

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016)**

**Shylvia Andriani<sup>1)</sup>, Junaidi<sup>2)</sup>, Sri Rahayu<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi

<sup>2&3)</sup>Dosen Pembimbing

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine and obtains evidence empirical about the influence of the quality of human resources, the implementation of the regional financial accounting, and utilization of information technology on the quality of financial reports SKPD with a system of internal control the government as variable intervening. The research on the entire financial administration officials SKPD of Merangin regency on 2016 , by using the primary data was obtained from questionnaires distributed to respondents. A method of the sample collection by using purposive techniques of sampling , as many as 30 respondents. Analysis of data using smartpls version 3.0. through outer, inner model and hypothesis testing. Outer model and inner model showed the results of all research instrument are valid, reliabel and feasible to be to explain a model variables. The results of testing showing directly that the quality of human resources and the utilization of technology not significant on the quality of financial report, regional financial accounting system significant on the quality of financial report. Testing indirectly shows that the quality of human resources, regional financial accounting system, and utilization of information technology not significant on the quality of financial statements with internal control system of government as a variable no intervening. Implication from the review is expected to contribute empirically as lessons learned about the quality of human resources ,the system implementation accounting regional financial, utilization of information technology and system internal control the government in working units. Can also become as a reference for future researches and as information and consideration in the policies on regional financial management to achieve the quality of local government financial statements.*

*Keywords: the quality of financial report, the quality of human resources, regional financial accounting system, utilization of information technology , internal control system the government.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pejabat penatausahaan keuangan SKPD kabupaten Merangin pada tahun 2016, dengan menggunakan data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebanyak 30 responden. Analisis data menggunakan smartpls versi 3.0. pengujian inner model, outer model dan pengujian hipotesis. outer model dan inner model menunjukkan instrument yang valid, reliabel dan layak digunakan untuk menjelaskan model variabel. Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian secara tidak langsung menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening. Implikasi dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara empiris sebagai bahan pembelajaran tentang kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD. Juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini organisasi sektor publik terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi keuangan Negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah dalam rangka mencapai keberhasilan otonomi daerah ditandai dengan adanya perubahan atau perbaikan pengelolaan keuangan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah dituntut untuk terus melakukan pembenahan pada lembaga-lembaga sektor publik, tuntutan ini berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (PP No.71, 2010), sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan baik itu pihak internal maupun eksternal suatu organisasi.

Penelitian ini didorong oleh fenomena yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian masih dibawah target yang ingin di capai, dari 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK pada tahun 2014, hanya 251 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau sebesar 49,80% (IHPS, 2015), hal ini masih dibawah target mengingat pemerintah menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2014 mencapai sebesar 60% seperti tertuang dalam indikator keberhasilan reformasi birokrasi (PermenPAN dan RB No. 11 Tahun 2011). Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor lemahnya sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sistem akuntansi keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi keuangan belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah itu sendiri.

Faktor yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Namun dalam pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah, terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi akan menjadi sia-sia.

Pengendalian intern juga sebagai faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan model dari penelitian Roviyantje (2011) mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang dilengkapi oleh Yosefrinaldi (2014) mengenai pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern

pemerintah sebagai variabel intervening. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari tahun penelitian pada penelitian sebelumnya penelitian di lakukan pada tahun 2011, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Tempat penelitian, pada penelitian sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Merangin.

Penelitian ini juga melakukan penambahan variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi, serta perbedaan juga terletak pada alat analisis. Pada penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS sedangkan pada penelitian ini menggunakan Smart *Partial Least Square* (SEM-PLS) Vers. 3.0 sebagai alat analisis. Pemilihan sampel juga menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya sampel diambil sebanyak 14 dinas dengan pegawai sub-bagian keuangan/akuntansi, sedangkan pada penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagai responden yang dilandasi pemikiran bahwa PPK-SKPD merupakan orang yang berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, sehingga pemahaman PPK atas sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan yang dijelaskan pada sub bab latar belakang, masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara empiris tentang menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi penelitian di bidang akuntansi sektor publik dimasa-masa mendatang. Serta memberikan masukan (input) kepada para aparatur yang bertanggungjawab, tentang perlunya perhatian lebih lanjut tentang sumber daya manusia, pengendalian intern serta sistem akuntansi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami;

#### 2.1.2 Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010).

#### 2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan

Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa

pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan peraturan kepala daerah.

### 2.1.4 Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

### 2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

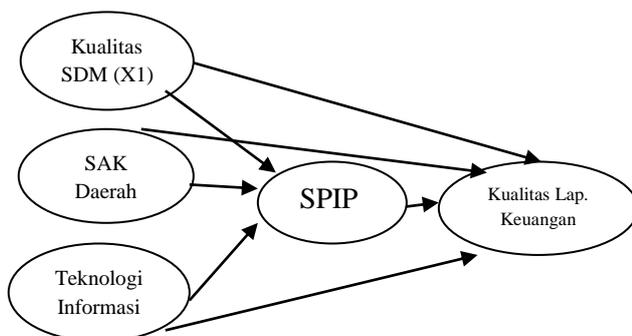
Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.3 Hipotesis Penelitian

Kualitas laporan keuangan SKPD (Y2) sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (X) yaitu sumber daya manusia (X1) sistem akuntansi keuangan (X2) dan pemanfaatan

teknologi informasi (X3), serta sistem pengendalian intern pemerintah (Y1) sebagai variabel intervening. Hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Merangin

Amran dalam Yudianta (2011) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Keberhasilan suatu instansi salah satunya di pengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. penelitian Roviyantie (2011), Yudianta (2011), Ihsanti (2014), Yensi (2014) dan Hertati (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia pada kualitas LKPD sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H1: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Merangin

### 2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Merangin

Penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah itu sendiri. Penelitian Yensi (2014) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara sistem akuntansi keuangan

daerah pada kualitas LKPD sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H2: sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Merangin

### 2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Merangin

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristik kualitas suatu laporan keuangan. Penelitian Yudianta (2011), Yosefrinaldi (2014) dan Hertati (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas LKPD sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H3: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Merangin

### 2.3.4 Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Merangin Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Menurut Irwan dalam Sudiarianti (2011) menyatakan bahwa SPIP yang dijalankan oleh SDM yang memiliki kompetensi mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa SAP dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan adanya pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan memenuhi empat karakteristik yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara

lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristik kualitas suatu laporan keuangan.

Sehingga dengan adanya kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi serta sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai sebagai variabel intervening maka akan menghasilkan keluaran berupa kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening. sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H4: Kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Merangin dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening.

## 3. METODOLOGI

### 3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yang dipilih oleh peneliti adalah berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas yaitu Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Intervening Pada seluruh SKPD Kabupaten Merangin sebagai objek penelitian. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin tersebut terdiri dari 2 Sekretariat, 14 Dinas, 1 Inspektorat, 10 Badan, 3 Kantor.

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur pejabat pengelolaan keuangan di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang terdiri dari 2 Sekretariat, 14 Dinas, 1 Inspektorat, 10 Badan, dan 3 Kantor. Populasi diwakili PPK-SKPD yang berjumlah 30 responden dengan asumsi bahwa mereka memahami semua kegiatan penatausahaan pada SKPD masing-masing (Sudiarianti, dkk, 2015). Dengan mempertimbangkan sedikitnya jumlah populasi, maka peneliti berinisiatif untuk menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel yakni 30 (tiga puluh dua) responden. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2010) bahwa jika jumlah populasi penelitian kurang dari 100 orang, maka sebaiknya diambil semuanya sebagai sampel atau responden penelitian.

### 3.3 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan *Smart Partial Least Square* (SEM-PLS). Menurut Ghozali (2015) *Partial Least Square* (PLS)) merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

### 3.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

#### 3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi.

##### 1. Kualitas Sumber daya manusia (X1)

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PPK-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas jabatan dalam penatausahaan keuangan dengan indikator kemampuan individu, pengetahuan, perilaku serta organisasi dan kelembagaan. Indikator disimbolkan sebagai berikut:

SD1: kemampuan individu

SD2: pengetahuan individu

SD3: perilaku individu

SD4: organisasi dan kelembagaan

##### 2. Sistem akuntansi keuangan (X2)

Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Indikator yaitu kesesuaian dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, analisis transaksi dan pencatatan secara kronologis, yang disimbolkan sebagai berikut:

SA1: Kesesuaian dengan SAP

SA2: Pengidentifikasian transaksi

SA3: Analisis transaksi

SA4: Pencatatan secara kronologis

##### 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan

keputusan. Indikator terdiri dari ketersediaan computer, pengolahan data transaksi, keefektifan kerja dan pemanfaatan internet, yang disimbolkan sebagai berikut:

TI1: ketersediaan komputer

TI2: pengolahan data transaksi

TI3: keefektifan kerja

TI4 : pemanfaatan internet

#### 3.4.2 Variabel Intervening

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y1). Indikator penerapan SPIP sesuai dengan PP no. 60 tahun 2008. Sistem pengendalian intern diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring. Dengan simbol sebagai berikut:

SP1: Lingkungan pengendalian

SP2: Penilaian risiko

SP3: Aktivitas pengendalian

SP4: Informasi dan komunikasi

SP5: Monitoring

#### 3.4.3 Variabel Dependen

Penelitian ini menjadikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai variabel dependennya, untuk melihat bagaimana keterkaitan variabel sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Dengan simbol sebagai berikut:

KL1 : relevan

KL2 : andal

KL3 : dapat dibandingkan

KL4 : dapat dipahami

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Uji Partial Least Square (PLS)

Dalam analisis dengan menggunakan PLS ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

##### a. Menilai *outer model* atau *measurement model*

Ada tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

##### b. Menilai *Inner Model* atau *Structural Model*

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

- c. Mengkonstruksi diagram jalur
- d. Estimasi
- e. *Goodness of fit*
- f. Pengujian Hipotesis

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Uji *Partial Least Squares* (PLS)

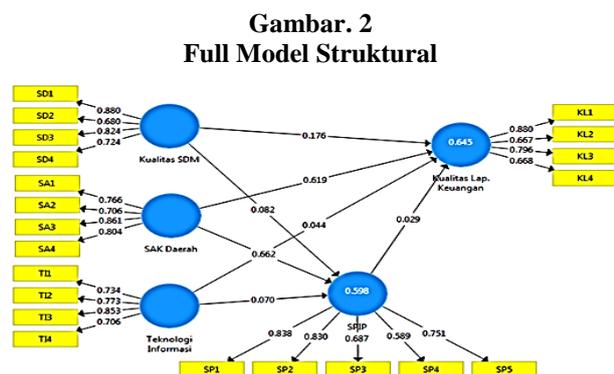
Ada dua pengujian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares* PLS yaitu uji *outer model* (uji indikator) dan *inner model* (uji struktural).

###### a. Uji *Outer Model* (Uji Indikator)

Uji *outer model* laten atau dengan kata lain mengukur seberapa jauh indikator itu dapat menjelaskan variabel latennya. Untuk indikator reflektif seperti yang digunakan di dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melihat hasil *outer loadings* (*convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reability*).

###### 1) *Convergent Validity*

*Convergent Validity* dari uji *outer model* dapat dilihat dari hasil *outer loadings* model penelitian dengan indikator reflektif yang menunjukkan korelasi antara nilai indikator dengan *constructnya*. Hasil *outer loadings* dapat diperoleh hasil berupa gambar *outer loadings* Berdasarkan hasil *outer loadings* pada gambar 2 dapat diketahui bahwa setiap indikator valid karena memiliki nilai loading di atas 0,5.



Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa semua indikator telah valid karena memiliki nilai *loading* di atas 0,5. Maka didapat indikator-indikator konstruk memenuhi nilai *convergent validity* dengan faktor loading > 0.5 yaitu semua indikator untuk variabel kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data indikator tersebut dalam diagram *full model* adalah valid dan memiliki konvergen yang baik.

###### 2) *Discriminant validity*

Nilai AVE kualitas sumber daya manusia (X1) sebesar 0,610. Nilai AVE *construct* sistem akuntansi keuangan daerah (X2) sebesar 0,618. Nilai AVE *construct* pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,591. Nilai AVE *construct* Sistem pengendalian intern pemerintah (Y1) sebesar 0,555. Nilai AVE *construct* kualitas laporan keuangan (Y2) sebesar 0,575 Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut memiliki *discriminant validity* yang cukup karena memiliki nilai di atas 0,5, dimana dipersyaratkan model yang baik jika nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Ghozali, 2015).

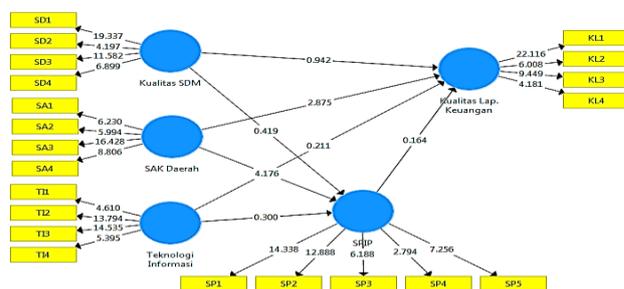
###### 3) *Composite Reability*

Hasil *composite reliability* semua *construct* menunjukkan nilai di atas 0,7, yaitu 0,861 untuk Kualitas SDM (X1), 0,866 untuk SAK Daerah (X2), 0,852 untuk pemanfaatan teknologi (X3), 0,860 untuk SPIP (Y1), 0,842 untuk kualitas laporan keuangan (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa semua *construct* layak untuk dilakukan uji *inner model*.

###### b. Uji *Inner Model* (Uji Struktural)

Uji *inner model* pada prinsipnya adalah menguji pengaruh antara satu variabel lain dengan variabel laten lainnya baik eksogen maupun endogen. Dapat dikatakan juga menguji hipotesis antara variabel laten yang satu dengan variabel laten lainnya. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil *path analysis* dan *goodness of fit*. Stabilitas dari estimasi ini diuji dengan menggunakan uji *t-statistic* yang diperoleh lewat prosedur *bootstrapping*.

**Gambar. 3**  
**Hasil Pengujian *Bootstrapping***



Hasil *Goodness of fit* menunjukkan variabilitas dari variabel laten dalam model penelitian. Nilai *goodness of fit* diperoleh dari koefisien  $R^2$  (*R square*). Hasil *R square* diketahui bahwa Variabilitas SPIP (Y1) dapat dijelaskan oleh variabilitas kualitas sumber daya manusia (X1), Sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan teknologi informasi (X3) sebesar 55,2%, sisanya sebesar 44,8% merupakan variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Selain itu, variabilitas kualitas laporan keuangan (Y2) dapat dijelaskan oleh variabilitas kualitas sumber daya manusia (X1), Sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan teknologi informasi (X3) sebesar 58,8% sisanya sebesar 41,2 % merupakan variabilitas lain yang tidak

terdapat dalam model penelitian seperti Standar Akuntansi Pemerintah. Dari nilai *R Square* untuk variabel Sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan masing-masing sebesar 0.552 dan 0.588 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori moderat.

## 4.2 Pengujian Hipotesis

### a) Uji Pengaruh Langsung

Hasil *path coefficients*, nilai *original sample* yang bernilai positif menunjukkan pengaruh yang searah (positif). Kualitas sumber daya manusia memiliki koefisien positif sebesar 0,176 yang menunjukkan pengaruh yang searah (positif). Nilai *p value* 0,374 tingkat kesalahan ( $\alpha 5\%$ ), dengan nilai t-statistik sebesar  $0,942 < t\text{-tabel}$  sebesar 1,697, hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki koefisien positif sebesar 0,619 yang menunjukkan pengaruh yang searah (positif). Nilai *p value* 0,004 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha 5\%$ ), dengan nilai t-statistik  $2,875 > t\text{-tabel}$  1,697, Gambaran ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi memiliki nilai koefisien atau *original sample* positif sebesar 0,044 ini menunjukkan bahwa pengaruh yang searah atau positif. Nilai *p value* 0,833, dengan nilai t-statistik  $0,211 < t\text{-tabel}$  1,697, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### b) Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh tidak langsung positif dengan nilai koefisien sebesar 0,002 dengan *p-value* sebesar 0,961, nilai t-statistik sebesar  $0,049 < t\text{-tabel}$  sebesar 1,697. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *p value* 0,877 dengan tingkat kesalahan ( $\alpha 5\%$ ). Nilai t-statistik  $0,154 < t\text{-tabel}$  1,697, dengan nilai koefisien 0,019. Pemanfaatan teknologi memiliki nilai *p value* 0,968, dengan tingkat kesalahan ( $\alpha 5\%$ ). Nilai t-statistik  $0,040 < t\text{-tabel}$  1,697, nilai koefisien positif sebesar 0,003. Hasil penelitian tidak langsung menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening.

## 4.3 Pembahasan

Pengetahuan yang dimiliki oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah mampu menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal. Hutapea & Thoha (2008), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan informasi

yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) juga menunjukkan hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia pejabat penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Merangin masih perlu di tingkat oleh Pemerintah Daerah, dimana dilihat dari data responden, masih banyaknya pejabat penatausahaan keuangan yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, hal tersebut dapat mempengaruhi kurang optimalnya pemahaman pejabat penatausahaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemaparan tersebut didukung oleh (Warisno, 2008), yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Didukung juga oleh Notoatmodjo (2009), menyatakan bahwa elemen pengembangan sumber daya manusia yakni pendidikan dan pelatihan, dimana pendidikan formal didalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat didalam pengelolaan keuangan daerah supaya dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kabupaten Merangin secara rutin mengadakan diklat pengelolaan keuangan daerah dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah, mengingat Pejabat penatausahaan keuangan SKPD memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan sebagian besar bukan dari latar belakang bidang akuntansi, sebab pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pejabat pengelolaan keuangan daerah, karena semakin baik kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

### 4.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat penatausahaan keuangan, cenderung akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Dimana dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan sistem akuntansi keuangan

daerah, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007), semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga mampu memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sistem berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah satu kesatuan yang apabila diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Yensi, 2014).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yensi (2014) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ihsanti (2014) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

#### 4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pejabat penatausahaan keuangan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan, dimana pemanfaatan teknologi dapat meminimalisasi berbagai kesalahan, karena aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas suatu laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan data dapat memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan dan keterandalan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD masih perlu ditingkatkan, mengingat dari hasil penelitian mengindikasikan masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat penatausahaan keuangan, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan daerah dikarenakan penerapan sistem teknologi informasi masih mengalami kendala, seperti kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam penerimaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena pada dasarnya teknologi informasi hanyalah sebuah alat yang memerlukan peran manusia, sehingga optimal atau tidaknya pemanfaatan teknologi informasi tergantung

pada manusia yang mengoperasikannya. Kendala pemanfaatan teknologi oleh pejabat pengelolaan keuangan juga terkait dengan masih penyesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Menurut Simanjuntak (2010) dan Bastian (2006) tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia antara lain adalah *Information Technology (IT) Based System* yakni adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan *IT based system* yang lebih rumit.

#### 4.3.3 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Merangin masih mengalami kelemahan seperti yang disampaikan oleh BPK melalui laporan hasil pemeriksaan. BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (LHP Kabupaten Merangin, 2015). Menurut BPK permasalahan SPI itu terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

Terkait permasalahan tersebut, pemerintah daerah belum mampu mendapatkan opini wajar tanpa pengencualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian intern, karena semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berdampak pada peningkatan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Agar sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Bupati selaku kepala daerah serta seluruh kepala SKPD wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 60 tahun 2008), sehingga pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
3. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
4. Kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening.

### 5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas tiga variabel independen yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan SKPD, variabel lain diabaikan dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada SKPD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada SKPD tersebut dan tidak digeneralisasi pada semua keadaan.
3. Responden penelitian ini hanya 1 orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dikarenakan keterbatasan waktu sehingga belum dapat sepenuhnya mencerminkan seluruh keadaan di lapangan.
4. Data yang diperoleh dari jawaban responden didasarkan pada persepsi responden yang rentan menimbulkan bias yaitu ketidaksesuaian persepsi responden dengan keadaan yang sesungguhnya.

### 5.3 Saran

1. Mengingat pentingnya kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Merangin perlu secara rutin mengadakan diklat dalam penyusunan laporan keuangan dan melakukan sosialisasi yang berkaitan keuangan mengingat PPK-SPKD memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan sebagian besar bukan dari latar belakang bidang akuntansi.

2. Pemerintah Kabupaten Merangin hendaknya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadakan pelatihan atau diklat yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang akuntansi keuangan.
3. Pemerintah Kabupaten Merangin juga perlu meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah mengingat dimana pengendalian intern dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap jalankan kegiatan pemerintahan.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, mengingat hasil *R-square* sebesar 0,588 mengindikasikan bahwa terdapat 41,2% variabilitas kualitas laporan keuangan dijelaskan variabel lain diluar model sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali dan mempertimbangkan variabel-variabel lain dan indikator-indikator lain.
5. Memperbesar jumlah sampel yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah dan melengkapi metode survey dengan melakukan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.
6. Untuk penelitian selanjutnya, terlebih dahulu memperbaiki kuesioner yang digunakan dalam penelitian.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Donal R. Cooper & Pamela S. Schindler. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Edisi 9. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Fikri, M. Ali, dkk. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Jurnal SNA 18 Univesitas Sumatera Utara*.
- Ghozali, Imam, 2015. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Syofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hertati, Lesi. 2015. Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Research Journal of Financial and Accounting*. Vol 6 No. 8, 2015.
- Hutapea, Parulian dan Thoha N. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Artikel Univesitas Negeri Padang*.
- Keputusan menteri dalam negeri Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja daerah
- Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Mahsun, dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah, 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah, 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Daerah PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Universitas Siliwangi*.
- Sudiarianti, Ni Made, dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal SNA XVIII*.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Yensi, Desy Sefri, dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*.

Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). *Jurnal Unniversitas Negeri Padang*.

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) BPK, RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2015 (<http://www.bpk.go.id>)